

Komunikasi Internasional sebagai Sarana Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara

**Harits Andrian Ramadhani,
Niken Retno Widyana,
Retno Trisna Wardani**

Universitas Riau

email: harits.dhani92@g-mail.com

ABSTRACT

International communication is an important component in international relations. This relates to conflict resolution related to two or more countries. Indonesia as one of the countries in the world cannot be separated from territorial dispute conflicts such as the North Natuna Sea territorial dispute. The North Natuna Sea conflict is a conflict related to many countries. As a complex conflict resolution, means of settlement are needed. Indonesia uses international communication as a means of resolving the North Natuna Sea conflict. So this study aims to find out the basis of international communication used by Indonesia and to investigate further about how Indonesia's international communication is implemented as a means of resolving the North Natuna Sea conflict. This study uses qualitative methods and uses the concept of international communication in order to obtain comprehensive research results. Indonesia has taken a number of actions, starting from a peaceful path to a firm stance, President Joko Widodo is clearly seen using an active actor's role to seek ways of peace and of course has a main focus, namely protecting Indonesia's national interests in Natuna. International communication is indeed the first and main way to bridge problems and find a middle point. Of course it is supported by a number of firm actions so as not to be complacent and of course the attitudes of the two countries which are in tension must still respect existing international law.

Keywords: *International Communication, facilities, North Natuna Sea*

Komunikasi internasional merupakan komponen penting dalam hubungan internasional. Hal ini berkaitan dengan penyelesaian konflik yang berkaitan dengan dua negara atau lebih. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia tidak lepas dari konflik sengketa wilayah seperti sengketa wilayah Laut Natuna Utara. Konflik Laut Natuna Utara merupakan konflik yang melibatkan banyak negara. Sebagai penyelesaian konflik yang kompleks, diperlukan sarana penyelesaian. Indonesia menggunakan komunikasi internasional sebagai sarana penyelesaian konflik Laut Natuna Utara. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar komunikasi internasional yang digunakan oleh Indonesia dan mengkaji lebih jauh bagaimana komunikasi internasional Indonesia diimplementasikan sebagai sarana penyelesaian konflik Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan konsep komunikasi internasional sehingga diperoleh hasil penelitian yang komprehensif. Berbagai tindakan telah dilakukan Indonesia, mulai dari jalan damai hingga sikap tegas, Presiden Joko Widodo terlihat jelas menggunakan peran aktor aktif untuk mencari jalan perdamaian dan tentunya memiliki fokus utama yaitu menjaga kepentingan nasional Indonesia di Natuna. Komunikasi internasional memang merupakan cara pertama dan utama untuk menjembatani permasalahan dan mencari titik tengah. Tentunya didukung dengan beberapa tindakan tegas agar tidak terlena dan tentunya sikap kedua negara yang sedang bersitegang harus tetap menghormati hukum internasional yang ada.

Kata-kata Kunci: *Komunikasi Internasional, fasilitas, Laut Natuna Utara*

Pendahuluan

Komunikasi merupakan suatu komponen penting dalam pertukaran informasi didalam kehidupan ini dan menjadi penentu keberlangsungan kehidupan. Komunikasi saat ini juga disadari dapat menyebarluas dan semua orang memerlukan komunikasi untuk mendapatkan informasi. Maka dari itu dalam penyebarannya komunikasi memerlukan media penyampaian. Seiring perkembangannya, komunikasi mulai menyebar melintasi batas negara, hal ini dikarenakan adanya teknologi yang semakin canggih serta merupakan bukti dari globalisasi, dan adanya keperluan berkomunikasi dengan orang-orang diluar dari negara atau daerah kita sendiri. Oleh karena itu, dikenal juga dengan komunikasi internasional.

Komunikasi internasional tiap – tiap negara tentu miliki ciri khas masing – masing negara, cara hidup disuatu negara menentukan komunikasi yang terbentuk. Komunikasi internasional juga dipandang sebagai urgensi dikarenakan komunikasi internasional digunakan setiap saat, khususnya untuk menyelesaikan permasalahan luar negri. Salah satunya yakni saat indonesia menghadapi konflik laut china selatan. Sebagaimana yang kita tahu, penyelesaian konflik ini memerlukan komunikasi internasional dan jalur diplomasi yang damai, sebelum masuk kepada respon selanjutnya. Pada konflik Laut Natuna Utara, strategi komunikasi serta sikap indonesia di uji dalam upaya penyelesaiannya, pasalnya komunikasi yang baik tentunya diharapkan mencapai hasil yang terbaik. Dan menjadi sebuah solusi utama penyelesaian. Saat dalam upaya penyelesaian indonesia melakukan pendekatan diplomasi dengan beberapa negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan negara lainnya. Sebenarnya banyak negara tetangga yang tentunya tidak sejalan dengan indonesia atau memanfaatkan situasi. Oleh karena itu, indonesia harus memilih dan memilah saat melakukan diplomasi.

Tentunya alasan indonesia melakukan komunikasi yang baik dengan negara tetangga dan membangun jalur diplomasi yang erat. Hal ini berguna untuk mencapai kepada kepentingan nasional indonesia. Pada konteks kali ini, Indonesia membutuhkan dukungan dari negara tetangga dalam menyelesaikan konflik Laut Natuna Utara. Bagi indonesia, natuna memiliki arti yang sangat penting, seling berkaitan kemandirian serta kepentingan nasional indonesia ada disana.

Secara sederhana kepentingan nasional dapat dipahami juga sebagai tujuan negara dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Didalam kepentingan nasional seringkali ditemukan adanya unsur kehidupan yang penting dan saling berhubungan yakni militer, kemandirian negara, kesejahteraan, dan ekonomi. Kali ini terancamnya kepentingan nasional indonesia dikarenakan sengketa Laut Natuna Utara merupakan Kepentingan nasional Indonesia yang terancam dengan terjadinya sengketa Laut Natuna Utara dan termasuk pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, akan tetapi masuk ke dalam peta tradisional Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Hal tersebut menjadi dasar klaim RRT atas Laut Natuna Utara serta adanya permasalahan batas wilayah perairan dengan Vietnam. Para oknum nelayan Vietnam melakukan pelanggaran antaralain masuk kedalam Zona Eksklusif Indonesia (ZEE) serta terdeteksi terdapat aktivitas penangkapan ikan yang dalam hal ini tentu illegal. Dengan adanya permasalahan tersebut, Indonesia telah menyadari bahwa hal ini dapat mengancam wilayah kedaulatan negara Indonesia sendiri di Natuna

Konsep dan Praktik Komunikasi Internasional

Dalam penyelesaian konflik Laut Natuna Utara tentunya memerlukan komunikasi internasional sebagai bentuk penyelesaian hubungan secara diplomatik. Komunikasi seringkali menjadi alat utama untuk membantu berjalannya hubungan diplomatik negan

negara-negara lain. Hal ini dikarenakan, komunikasi menjadi jalan damai dan strategi respon utama dalam mengatasi permasalahan yang ada, terkhusus pada konflik laut china selatan yang diangkat dalam penelitian ini.

Komunikasi internasional dalam konteks permasalahan negara biasanya dilakukan oleh aktor-aktor negara yang memiliki kewenangan. Misalnya para pejabat, duta besar, hingga presiden. Dengan penggunaan jalur diplomatik menjadikan komunikasi internasional memiliki peranan yang sangat penting serta komunikasi internasional lebih banyak dipergunakan untuk memperluas pengaruh, kemudian menunjukkan komitmen dan solidaritas antar negara, serta mengindari dan mencegah perbedaan pendapat dan kesalahpahaman dalam menjalankan hubungan diplomatik. Serta hal yang paling penting ialah, digunakan sebagai bentuk penyetujuan kesepakatan yang akan dibuat. Komunikasi internasional yang baik dapat dicerminkan dari hasil kesepakatan dan serta proses dari membuat kesepakatan tersebut dapat membuahkan hasil hubungan bilateral serta multilateral yang baik. Serta melalui hal tersebut, suatu negara akan jauh lebih dipandang baik oleh negara lain. Hal ini tentu dapat membangun reputasi serta branding negara yang bagus. Dengan begitu negara lain tidak akan ragu menerima tawaran kerja sama yang telah diajukan (Hanifahturahmi, 2020)

Jika menelisik lebih jauh tujuan dilaksanakannya diplomasi ialah tidak lain untuk mencapai kepentingan nasional dua negara. Masing – masing negara tentu memiliki kepentingan nasional yang berbeda. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu membutuhkan bantuan dan kerjasama negara lain. Maka dari komunikasi internasional dibutuhkan untuk membangun hubungan diplomasi yang baik (Hanifahturahmi, 2020).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan didukung dengan penggunaan pendekatan analisis deskriptif. Kemudian adapun pengumpulan data di dalam penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, dimana data dan literatur penelitian ini diambil serta bersumber dari penelitian peneliti sebelumnya. Tujuan dari diadakannya penelitian ini untuk mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi. (Hanifahturahmi, 2020).

Hasil dan Pembahasan Strategi dan Kebijakan Komunikasi Internasional di Indonesia

Di Indonesia ataupun di negara lain, kebijaksanaan serta makna komunikasi dapat terlihat jelas dan dicerminkan melalui nilai – nilai yang ada dalam kehidupan sehari – hari, yang dimana dianut oleh masing-masing anggota masyarakat dari suatu suku. Dan secara tidak langsung diimplementasikan lewat aturan kehidupan yang tidak tertulis. Kemudian apabila ditelaah secara eksplisit, kebijaksanaan komunikasi dapat dilihat melalui aturan – aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang diperuntukkan bagi warga negaranya.

Adanya komunikasi internasional tentu terjadi karena kaburnya batas negara, semakin mudahnya akses sistem informasi yang masuk. Banyak negara yang menyadari betapa pentingnya menyusun suatu strategi dan kebijakan komunikasi internasional negaranya untuk menjaga dan menaikkan citra negara tersebut. Atau menghidnai kesalahan – kelengahan pengambilan keputusan di tingkat negara. Kesiapan mengenai kebijakan komunikasi internasional juga mencerminkan kemajuan dari suatu negara serta menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi internasional. Dan mencegah suaru negara tidak tertinggalan teknologi masa kini,

Semakin gencarnya komunikasi internasional tidak hanya penting bagi aktor negara saja. Akan tetapi merupakan suatu kebutuhan pasar yakni konsumen yang membutuhkan masuknya informasi dan pertukaran informasi. Oleh karena itu mengatur para penyedia layanan jasa informasi merupakan suatu urgensi pula.

Sejak bergabungnya Indonesia kedalam PBB ditahun 1950 serta bergabungnya dalam ASEAN. Indonesia menyadari harus memiliki kebijakan komunikasi internasional untuk menerapkan aturan bagi para aktor. Hal ini untuk memnentukan sikap dna komunikasi dilapangan seperti apa yang dikeluarkan. Dibentuknya komunikasi internasional tentunya harus berpedoman dengan nilai – nilai tanah air, serta landasan hukum negara yang tentunya sejalan.

SM Ali selaku konsultan komunikasi yang bekerja di UNESCO berpedanpat, kebijakan komunikasi internasional tidak lepas dari bagian kebijakan nasional, kemudian seharusnya pula kebijakan komunikasi bersinergi dengan kebijakan pembangunan, seperti halnya pendidikan, kebudayaan, dan kependudukan. Program – program yang dicanangkan suatu negara tiddak lepas dari kontribusi komunikasi didalamnya. Komunikasi yang baik menentukan kematangan dan mencerminkan perilaku dalam suatu negara (Setiawan, 2018).

Dalam sebuah negara tentunya memerlukan aturan tertulis yang wajib dipatuhi oleh masyarakat negaranya. Untuk mencapai kepentingan negaar dan membuat suatu negara lebih maju tentu memerlukan kerjasama. Oleh karena itu dibutuhkannya kerjasama bilateral atau dua negara dan multilateral dengan banyak negara. Pentingnya pengoptimalan sistem informasi juga mrupakan impelementasi upaya mensehjahterakan negara. Didalam informais tidak hanya penyampaian komunikasi, melainkan terhadap motivasi dan hiburan yang tentunya dikemas sebaik mungkin. Lebih lanjut adanya transparansi dalam pemberitaan yang dapat diketahui masyarakat, serta membantu lancarnya komunikasi antara pejabat daerah dan petinngi lembaga lainnya.

Pada tahun 1984 di Solo, Indonesia menggelar Seminar Internasional Pemerataan Satelit Komunikasi yang dilakukan oleh Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) serta dihadiri para konsultan komunikasi dari berbagai negara, yakni Jepang, Thailand, Filipina, Australia, Singapura. Pada kesempatan kala itu, indoensia menjadi tuan ruamh acara tersebut. Komunikasi internasional disadari sebagai komponen dan sarana peningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerjasama dan pembangunan kawasan. Serta kerjasama dalam lingkup *Intenational Govermental Organization* yang dimana banyak negara bergabung. Kemudian mempermudah jalannya prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.

Dasar Hukum Komunikasi Internasional Indonesia

Komunikasi internasional dapat dilihat dalam dua kategori. Pertama, komunikasi internasional yang berkaitan dengan arus informasi global. Yang mana media internasional menjadi suatu isu pembahasan bagi sarjana komunikasi melalui arus informasi yang tidak terbedung dalam komunikasi global. Kedua, komunikasi internasional yang berkaitan dengan berbagai fenomena internasional baik politik internasional, hubungan internasional dan hubungan antarbudaya. Apabila dilihat dalam lingkup hubungan internasional, adanya dasar hukum komunikasi internasional ini bermula akibat adanya ketimpangan arus informasi di dunia. Ketimpangan arus informasi ini dialami oleh negara-negara berkembang karena adanya perbedaan konsep komunikasi internasional dengan negara-negara maju (Setiawan 2017).

Negara-negara maju cenderung menerapkan konsep kebebasan dalam komunikasi internasionalnya. Sehingga, informasi negara-negara maju dapat masuk dengan bebas ke negara lain. Sedangkan informasi dari negara-negara berkembang identik dengan hal-hal negatif seperti kemiskinan dan kerusakan. Ketidakseimbangan arus informasi di dunia ini menimbulkan keresahan bagi negara berkembang karena dapat memberikan dampak tersendiri bagi negara-negara berkembang. Sehingga, negara berkembang menuntut adanya keseimbangan arus informasi antara negara maju dengan negara berkembang. Tuntutan keseimbangan ini akhirnya disampaikan oleh negara-negara berkembang melalui *UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)* pada tahun 1970-an (Setiawan 2017).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia turut mendukung keresahan akibat adanya ketidakseimbangan informasi global ini. Pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh *UNESCO* bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan perencanaan komunikasi internasional membuah keputusan bahwa kebijakan komunikasi setiap negara kembali kepada susunan kebijakan komunikasi internasional negara masing-masing. Hal ini berarti dasar hukum komunikasi internasional suatu negara tergantung konsep komunikasi internasional yang negara tersebut gunakan dan dasar hukum komunikasi internasional yang negara tersebut rumuskan.

Berdasarkan keputusan bersama dalam pertemuan *UNESCO* tersebut, Indonesia memiliki landasan dasar tersendiri dalam komunikasi internasional. Landasan dasar komunikasi internasional Indonesia adalah Pancasila karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Tepatnya landasan dasar komunikasi internasional Indonesia ada pada sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Sila kedua ini memiliki makna bahwa harus mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama sehingga hal ini sejalan dengan apa yang telah dilaksanakan Indonesia yakni mengikuti rangkaian pertemuan *UNESCO* dalam menindaklanjuti keresahan negara-negara berkembang (Setiawan 2017).

Selain Pancasila, dasar hukum komunikasi internasional Indonesia terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada alinea I, yakni “*kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan*”. Alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar ini dijadikan sebagai dasar hukum komunikasi internasional adalah hal yang tepat karena ketidakseimbangan arus informasi antara negara berkembang dengan negara maju mengakibatkan negara-negara berkembang terjajah dalam hal informasi. Selanjutnya ditegaskan kembali pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “*dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial*”. Hal yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Indonesia yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia seperti mengikuti pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh *UNESCO* dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan kebebasan informasi global.

Selain itu, komunikasi internasional dalam kaitannya dengan hubungan internasional tidak akan terlepas dari hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia. Sehingga, Indonesia mengatur dasar hukum komunikasi internasionalnya dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam Bab IV Arah Kebijakan, huruf C angka 2 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam ketetapan tersebut telah mengatur dan menegaskan mengenai arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta berorientasi pada kepentingan nasional (Setiawan 2017). Selain itu, komunikasi internasional Indonesia yang berkaitan dengan hubungan luar negeri memiliki tujuan untuk memulihkan kondisi ekonomi dengan cara meningkatkan kualitas diplomasi.

Sehingga, dapat terjalannya kerja sama yang baik dalam skala regional ataupun internasional (Azhar 2022).

Penerapan Komunikasi Internasional Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara

Kebijakan komunikasi internasional Indonesia dapat dilihat melalui penyelesaian konflik Laut Natuna Utara yang diterapkan oleh Indonesia. Indonesia menerapkan komunikasi internasional menggunakan jalur diplomasi dengan pendekatan *Idealistic Humanistic Approach* atau sebuah pendekatan yang meletakkan komunikasi internasional sebagai alat dalam menyatukan bangsa di dunia melalui komunikasi yang dibangun secara harmonis dan humanis untuk mencapai kedamaian dunia (Hanifahturahmi 2020). Dengan menggunakan pendekatan *Idealistic Humanistic Approach* ini Indonesia menjadi negara penggerak kerja sama bagi negara-negara lain khususnya negara-negara yang mengklaim Laut Natuna Utara. Melalui pendekatan ini juga Indonesia menjalankan diplomasinya dengan negara-negara yang aktif akan konflik Laut Natuna Utara. Tujuan Indonesia dalam menjalankan diplomasi menggunakan pendekatan yang humanis ini adalah untuk mengurangi ketegangan antarnegara yang aktif dalam konflik Laut Natuna Utara khususnya negara-negara yang mengklaim Laut Natuna Utara. Selain untuk mengurangi ketegangan konflik, diplomasi menggunakan pendekatan humanis ini juga dilakukan agar Tiongkok sebagai negara yang mengklaim wilayah Laut Natuna Utara tidak melakukan semakin banyak pelanggaran pada wilayah kedaulatan Indonesia (Saragih 2018).

Strategi diplomasi Indonesia yang menggunakan pendekatan secara humanis dalam upaya penyelesaian konflik Laut Natuna Utara adalah diplomasi maritim (Hanifahturahmi 2020). Diplomasi maritim yang dimaksudkan di sini adalah upaya penyelesaian melalui upaya negosiasi atau perundingan. Negosiasi ini dilakukan oleh negara-negara yang aktif dalam konflik Laut Natuna Utara dan yang mengklaim wilayah Laut Natuna Utara. Hal ini dilakukan Indonesia sebagai bentuk pertahanan kedaulatan. Karena negosiasi yang dilakukan membahas terkait batas laut dan kerja sama maritim serta membahas pertahanan keamanan. Dilaksanakannya diplomasi maritim ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Sehingga, tujuan Indonesia menggunakan diplomasi maritim adalah untuk menyampaikan pesan secara eksplisit bahwa dibutuhkan kerja sama untuk menumpas berbagai sumber konflik di wilayah Laut Natuna Utara. Sumber konflik tersebut seperti aktivitas pencurian ikan, pelanggaran wilayah kedaulatan, sengketa wilayah dan pencemaran laut. Mengingat hal ini merupakan hal yang krusial bagi Indonesia karena wilayah Laut Natuna Utara merupakan perairan yang sangat potensial.

Selanjutnya, Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Laut Natuna Utara ini juga menggunakan prinsip diplomasi yang lebih berfokus pada dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, prinsip diplomasi ini dikenal dengan "Diplomasi Membumi" (Saragih 2018). Diplomasi dengan prinsip ini dilakukan dengan cara berfokus pada perlindungan kepentingan nasional Indonesia. Perlindungan kepentingan ini dilakukan Indonesia dengan cara meningkatkan jumlah perdagangan dan investasi di Indonesia. Sehingga, untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan meningkatkan perdagangan Indonesia melakukan penjarangan terhadap kapal-kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah kedaulatan Indonesia khususnya di sekitar wilayah laut Natuna. Selain dengan cara menumpas pelaku *illegal fishing*, guna memperkuat posisi Indonesia dan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah Indonesia juga memperkuat militer di wilayah Natuna dengan mengirimkan angkatan bersenjata.

Komunikasi internasional Indonesia selain menggunakan diplomasi dengan pendekatan humanis Indonesia juga telah menggunakan aksi-aksi sepihak (unilateral) yang berguna untuk memperkuat posisi Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara. Upaya memperkuat

posisi ini dilakukan seperti mengirimkan angkatan bersenjata dan meningkatkan aktivitas perdagangan yang didukung dengan penangkapan para pelaku pencuri ikan ilegal di wilayah Natuna Utara. Sehingga, dengan dilakukannya aksi ini Indonesia telah menegaskan bahwa Indonesia memiliki kepentingan nasionalnya di wilayah Laut Natuna Utara selain itu juga hal ini berkaitan dengan kedaulatan negara Indonesia.

Penerapan komunikasi internasional yang dilakukan Indonesia sebagai upaya penyelesaian konflik Laut Natuna Utara merupakan suatu kesatuan yang berkaitan. Hal ini terlihat jelas pada setiap langkah yang diambil Indonesia. Kebijakan komunikasi internasional yang berdasarkan pada kemerdekaan dan keadilan sosial serta perdamaian telah tergambar jelas pada setiap langkah diplomasi Indonesia menggunakan pendekatan yang humanis. Sehingga, dalam upaya penyelesaian konflik Laut Natuna Utara ini Indonesia menggunakan komunikasi internasional yang humanis sejalan dengan dasar hukum komunikasi internasional Indonesia dan tetap mengedepankan kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan prinsip diplomasi Indonesia.

Respon Terhadap Pertahanan Negara Indonesia Melalui Komunikasi Internasional

Ketegasan Indonesia dalam menjaga perairan laut Natuna Utara pada masa pemerintahan Jokowi bisa dilihat dari rekam jejak Indonesia yang sudah beberapa kali mengirimkan nota protes kepada Tiongkok. beberapa kali presiden Jokowi juga turun langsung mengunjungi Natuna untuk memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam menanggapi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok di laut Natuna Utara. Presiden Jokowi juga sempat melaksanakan rapat di KRI Imam Bonjol di daerah perairan Natuna untuk membahas illegal fishing terjadi di daerah laut Natuna Utara. (Sulistiyani, Pertiwi, & Sari, 2021).

Kemudian pada tahun 2017 Indonesia mengeluarkan peta baru yang mengubah nama laut Cina Selatan menjadi laut Natuna Utara. Hal ini merupakan salah satu tindakan tegas untuk memperingatkan bahwa laut Natuna Utara merupakan daerah teritorial Indonesia. Lalu juga Indonesia melalui menteri kelautan dan perikanan yaitu Susi Pudjiastuti pada tahun 2019 mendeklarasikan statement tegas terhadap para pelaku ilegal fishing di daerah laut Natuna Utara dengan menyebutkan bahwa akan menenggelamkan seluruh kapal ilegal fishing di perairan Natuna.

Pandangan Terhadap Strategi Komunikasi Internasional Indonesia

Konflik di laut Natuna utara sudah berlangsung sejak lama, bahkan sampai warga sekitar harus bersembunyi ketika sedang memancing pada malam hari dan melihat ada kapal nelayan berbendera asing. hal ini penulis dapatkan dari sumber langsung yaitu Paman dari penulis (Harits, 2022). Tindakan Indonesia yang sudah disampaikan sebelumnya merupakan tindakan yang sangat bagus. namun dalam penerapannya komunikasi internasional Indonesia belum sepenuhnya berjalan atau belum dianggap serius oleh negara lain. pasalnya sudah bukan hal yang baru jika kita mendengar kasus illegal fishing di perairan laut Natuna Utara, bahkan sampai pihak asing yang lebih agresif terhadap kita walaupun berada di wilayah teritorial kita. tindakan untuk mencegah konflik tidak bisa hanya dilaksanakan oleh satu pihak saja, harus ada bantuan dari pihak lain yaitu negara yang bersangkutan. mau sebaik apapun pertahanan dan militer Indonesia yang dikerahkan di laut Natuna Utara, namun jika dari pihak negara lain tidak tegas dan cenderung mendukung warga negaranya sendiri perihal ilegal fishing ini, maka sulit untuk menyelesaikan konflik dengan jalan damai.

Kesimpulan

Komunikasi internasional memiliki peranan penting dalam membangun pola hubungan diplomasi baik dengan negara lain, hal ini tentunya akan mempermudah kerjasama dan selalu ditempuhnya penyelesaian permasalahan dengan cara yang damai. Komunikasi internasional yang baik dan bijak juga membuat citra negara semakin lebih baik dan disegani negara lain. Kebijakan komunikasi internasional diambil dari segala aspek kehidupan dalam suatu negara yang nantinya diadopsi sebagai peraturan serta dipergunakan oleh aktor – aktor negara sebagai acuan. Oleh karena itu, komunikasi internasional suatu negara cenderung mencerminkan kehidupan negara tersebut.

Komunikasi internasional juga dianggap menjadi komponen mencapai kepentingan sosial negara. Kepentingan negara Indonesia dalam konflik Laut Natuna Utara yakni berkaitan dengan permasalahan kedaulatan, dimana atuna utara masuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kemudian di wilayah Natuna Utara terdapat aspek kehidupan yang penting meliputi: keamanan, militer, serta ekonomi dan kesejahteraan negara. Maka dari itu sikap dan respon Indonesia terhadap permasalahan ini sangat dipertimbangkan dalam setiap langkah keputusannya. Indonesia bersama negara ASEAN lainnya berusaha memiliki satu suara dan menunjukkan sikap tegas terhadap Tiongkok. Dalam konflik yang terjadi Amerika juga sepakat bahwa para negara anggota ASEAN harus bersatu, karena berkaitan dengan keamanan kedaulatan negara Asia Tenggara.

Dalam pendekatan menggunakan komunikasi internasional, presiden Joko Widodo telah mengambil sejumlah tindakan dari mulai jalan yang damai hingga sikap yang tegas, presiden Joko Widodo terlihat jelas menggunakan peran aktor yang aktif untuk mencari cara perdamaian dan tentunya memiliki fokus utama yakni melindungi kepentingan nasional Indonesia di Natuna. Adapun komunikasi internasional yang Indonesia layangkan secara tajam kepada Tiongkok lewat nota protes di tahun 2016, 2019, serta 2020, sebagai respon adanya indikasi pelanggaran kedaulatan di Laut Natuna Utara. Komunikasi internasional memang merupakan jalan awal dan utama untuk menjembatani permasalahan dan menemukan titik tengah. Akan tetapi, tentunya didukung oleh sejumlah tindakan yang tegas agar tidak lengah dan tentunya sikap – sikap kedua negara yang bersitegang harus tetap menghormati hukum internasional yang ada.

Referensi

- Azhar. 2022. “Konstruksi Komunikasi Internasional Dalam Menyikapi Ipeleksosbudhankamnas.” *Al-Idarah: Jurnal Pengkajian Dakwah Dan Manajemen* 10(1).
- Hanifahturahmi, Hanifahturahmi. 2020. “Komunikasi Internasional Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Sengketa Laut Cina Selatan Di Natuna Utara.” *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 3(2):147–59. Doi: 10.36341/Jdp.V3i2.1380.
- Saragih, Hendra Maujana. 2018. “Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut China Selatan.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* Viii(1).
- Setiawan, Daryanto. 2017. “Kebijakan Komunikasi Internasional Indonesia (International Communications Policy Indonesia).” *22 Simbolika* 3(1).